

B. Tujuan Penulisan

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi¹, bahwa tujuan penelitian sosial adalah menerangkan suatu fenomena atau peristiwa sosial. Untuk menerangkan fenomena perubahan iklim, tentunya penulis memerlukan wacana dan pengetahuan yang memuat fakta-fakta empiris yang penulis ambil dari buku, jurnal, surat kabar, media elektronik seperti internet ataupun televisi. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai Protokol Kyoto dan efektifitasnya dalam menangani isu lingkungan internasional
2. Penulis ingin memahami dan mengkaji lebih jauh mengenai dampak Protokol Kyoto bagi negara sedang berkembang terutama bagi India sendiri dalam menangani masalah lingkungan yang sedang dihadapi
3. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal:16-18

C. Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim melahirkan pemanasan global yang dipicu oleh kegiatan manusia yang melewati batas dalam memenuhi kebutuhan mereka. Perubahan iklim merupakan suatu perubahan kondisi fisik atmosfer bumi yang mencakup suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak buruk terhadap berbagai sektor kehidupan manusia.

Perubahan fisik ini tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan dalam kurun waktu yang cukup lama. Sejak dilangsungkannya *Revolusi Industri* pada tahun 80-an, lingkungan global menderita pencemaran udara yang berdampak besar pada sistem iklim global. Penggunaan sumber energi berbahan baku fosil seperti minyak bumi, dan batu bara serta gas mengakibatkan penipisan lapisan ozon yang merupakan pelindung bumi terhadap pancaran sinar matahari.

Penggunaan sumber energi tersebut menghasilkan gas buang seperti : karbondioksida (CO_2), Methana (CH_4), Nitrousoksida (N_2O), hydroflourokarbon (HFC_s), perflourokarbon (PFC_s) dan sulfurheksaoksida (SF_6)². Dari keenam sumber emisi gas rumahkaca (GRK) ini yang paling mempengaruhi perubahan iklim adalah CO_2 , CH_4 , N_2O . Gas-gas tersebut sebenarnya secara alami terdapat di atmosfer dan menyerap radiasi panas matahari di atmosfer bagian bawah. Inilah yang dinamakan efek rumahkaca. Tanpa gas rumahkaca alami tersebut suhu bumi akan mencapai 34°C lebih dingin dari yang kita alami sekarang³.

Masalahnya adalah seiring dengan meningkatnya taraf hidup manusia, emisi gas rumahkaca meningkat tajam karena meningkatnya konsumsi bahan bakar fosil (BBF) sejak berlangsungnya *Revolusi Industri* pada pertengahan tahun 1880-an.

² Download@http://www.answers.com/topic/kyoto_protocol, diakses tanggal 29 Juni 2005

³ Murdiyarso, Daniel, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi : Konvensi Perubahan Iklim*, KOMPAS, Jakarta, 2003, hal : 13

Akibatnya suhu atmosfer bumi sekarang menjadi $0,5^{\circ}$ C lebih panas dibanding suhu pada zaman pra-industri sejak tahun 1990⁴.

Meningkatnya konsentrasi gas rumahkaca ini diprediksikan pada 100 tahun yang akan datang, suhu global permukaan bumi naik 1,4 hingga $5,8^{\circ}$ C⁵. Dampak signifikan yang diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumahkaca diantaranya kondisi iklim yang cenderung berubah dan musim kemarau yang berkepanjangan akibat perubahan iklim yang tidak menentu serta adanya pemanasan global. Panas bumi yang berlebihan menyebabkan melelehnya es di daerah kutub sehingga berlanjut pada kenaikan volume air laut yang pada kelanjutannya menenggelamkan daerah pinggiran pantai di beberapa wilayah pantai negara-negara di seluruh dunia. Selain itu, juga terjadi bencana banjir hebat di beberapa negara di seluruh dunia. Peristiwa perubahan iklim dan pemanasan global tersebut sangat dirasakan oleh banyak negara di dunia, terutama negara sedang berkembang.

Di India, perubahan iklim ini mengakibatkan sedikitnya 60 juta orang harus mengungsi akibat banjir⁶. Banjir yang melanda wilayah India, Bangladesh, dan Mesir ini sebagai bukti bahwa perubahan iklim benar-benar terjadi dikarenakan naiknya permukaan air laut. Selain banjir, perubahan iklim ini juga mengakibatkan adanya gelombang panas yang mendera Andra Pradesh, India, hingga mengakibatkan sedikitnya 1664 orang meninggal dunia⁷. Naiknya suhu bumi yang berlebihan membuat gletser yang berada di pegunungan Himalaya memenuhi sungai Gangga di India hingga volume airnya bertambah dan dikhawatirkan akan membahayakan sekitar 400 juta masyarakat yang tinggal disekitar dataran sungai dan bergantung

⁴ [Download@http://www.Answer.com](http://www.Answer.com), *loc. cit.*

⁵ [Download@http://www.Envfor.nic.In/cc/India_unfccc.htm](http://www.Envfor.nic.In/cc/India_unfccc.htm), diakses tanggal 12 Juni 2004

⁶ [Download@http://www.SuaraPembaruan.com](http://www.SuaraPembaruan.com), diakses tanggal 15 September 2003-Pemberitaan tanggal 19 Januari 2003

⁷ *Ibid*

hidup terhadap sumber air sungai tersebut⁸. Naiknya permukaan air laut juga mengancam daerah pantai negara Mesir, Mozambique, Pakistan yang juga merupakan negara sedang berkembang (*Non Annex I*)⁹.

Menyikapi kondisi perkembangan alam global yang cenderung berubah dan bahkan berkelanjutan, atas inisiatif PBB, dibentuklah konvensi kerangka kerja tentang perubahan iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC) di Brazil, pada tahun 1992¹⁰. Kemudian dilanjutkan dengan mengadopsi Protokol Kyoto pada pelaksanaan *Conference of Parties* (COP III) di Kyoto, Jepang, pada bulan Desember 1997, sebagai tindak lanjut dari implementasi tujuan konvensi kerangka kerja tentang perubahan iklim (UNFCCC). Tujuan konvensi itu adalah untuk menstabilkan emisi gas rumahkaca ke atmosfer pada tingkat tertentu sehingga tidak membahayakan sistem iklim bumi.

Di dalam konferensi para pihak ketiga (COP III) di Kyoto, Jepang, disepakati adanya sebuah tata cara penurunan emisi GRK yang dikenal dengan Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol*). Mekanisme kyoto yang dikenal yaitu *Clean Development Mechanism* (CDM). CDM ini merupakan satu-satunya mekanisme yang bisa dilakukan antara negara maju dengan negara sedang berkembang.

Didalam Protokol Kyoto ini, negara maju (*Annex I*) mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisi CO₂ sebesar 5,2 persen dari tingkat emisi tahun 1990 untuk pelaksanaan hingga periode 2008-2012¹¹. Sedangkan negara sedang berkembang (*Non Annex I*) tidak mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisi gas rumahkacanya. Namun, negara sedang berkembang dapat berpartisipasi aktif dalam

⁸ [Download@http://www.Envfor.nic.In/cc/India_unfccc.htm](http://www.Envfor.nic.In/cc/India_unfccc.htm), *loc.cit*

⁹ Nicholson, Michael, *International Relations : A Concise Introduction*, MacMillan Press LTD, London, 1998, hal :165

¹⁰ Murdiyarsa, Daniel, *Protokol Kyoto : Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, KOMPAS, Jakarta, 2003, hal : 3

¹¹ [Download@http://www.cdmindia.com/background.htm](http://www.cdmindia.com/background.htm), diakses tanggal 14 April 2005

mengawasi penataan pencapaian target oleh negara-negara maju untuk dapat berpartisipasi dalam Protokol Kyoto. Setiap negara di dunia yang telah menandatangani dan meratifikasi konvensi PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC) harus terlebih dahulu meratifikasi Protokol Kyoto tersebut, jika ingin mengadopsi CDM.

Berkenaan dengan pelaksanaan mekanisme CDM yang terdapat didalam Protokol Kyoto, terjadi pro dan kontra dari beberapa negara anggota konvensi UNFCCC. Dimana Amerika Serikat sebagai salah satu negara pelopor dibentuknya konvensi PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC) memilih mundur dan menolak hasil perundingan konferensi para pihak ketiga (COP III) yang menyepakati Protokol Kyoto sebagai perjanjian lingkungan internasional untuk membatasi emisi negara maju atau negara industri hingga 5,2 persen dari total emisi negara maju berdasarkan tahun 1990 hingga periode 2008-2012.

Alasan Amerika Serikat menolak yaitu bahwa 80 persen penduduk dunia (termasuk yang berpenduduk besar seperti China dan India) dibebaskan dari kewajiban menurunkan emisi¹². Selain itu, implementasi Protokol Kyoto akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Negara maju lain yang juga menolak meratifikasi Protokol Kyoto adalah Australia.

Sikap Amerika Serikat dan Australia tersebut sempat menjadi kendala bagi pelaksanaan Protokol Kyoto karena legalitas Protokol Kyoto yang belum berkekuatan hukum. Hingga pada akhirnya Rusia yang juga merupakan negara industri maju meratifikasi Protokol Kyoto. Pada akhirnya Protokol Kyoto berkekuatan hukum dan mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005.

¹² Murdiyarto, *op.cit.*, hal : 26-27

Yang menjadi pokok permasalahan dari topik yang penulis paparkan, negara India menjadi sorotan negara maju dalam pelaksanaan mekanisme Protokol Kyoto. Amerika Serikat menunjuk India dan juga China sebagai negara berpenduduk besar yang juga harus dikenai kewajiban menurunkan emisi GRK. Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, mengatakan : "India dan Jerman berada diantara negara pengemisi paling atas. Dan India dibebaskan dari Kyoto". Lebih lanjut Bush mengatakan : "Protokol Kyoto secara fundamental cacat!"¹³ Statemen tersebut dikeluarkan oleh George W. Bush untuk menghindari kewajiban dalam membatasi dan menurunkan emisi GRK negaranya.

Protokol Kyoto ini menjadi perdebatan internasional karena adanya pro dan kontra terhadap proses ratifikasinya. Sejak dibentuknya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, hingga sepuluh tahun setelah Rio, iklim dunia ternyata tidak lebih baik. Penolakan beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Monaco, dan Rusia pada waktu itu menjadikan legalitas Protokol Kyoto sebagai hukum lingkungan internasional dipertanyakan.

Namun demikian, negara-negara maju seperti Uni Eropa, Jepang, dan negara maju lainnya tetap maju dan memperjuangkan Protokol Kyoto agar segera berkekuatan hukum dengan meratifikasi Protokol Kyoto dan memberi dukungan kepada negara sedang berkembang yang ingin ikut berpartisipasi didalam implementasi mekanisme kyoto.

India sebagai salah satu negara sedang berkembang menolak dan keberatan dengan adanya tekanan terhadap bangsa miskin untuk mengambil langkah dalam usaha memecahkan persoalan pemanasan global dengan memotong emisi gas

¹³ [Download@http://www.AsiaSource.org/asip/pactpolitics.cfm](http://www.AsiaSource.org/asip/pactpolitics.cfm), diakses tanggal 12 Juni 2004

rumahkaca. Ketua Persatuan Menteri Lingkungan dan Kehutanan, T.R. Baalu, mengatakan bahwa India ikut serta dalam menangani dampak lingkungan global dan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan menyetujui Protokol Kyoto¹⁴.

India telah menyerahkan instrumen tambahan di markas besar PBB. Instrumen tambahan India terhadap Protokol Kyoto merupakan komitmennya mencapai dan menyelesaikan berbagai isu global melalui pendekatan multilateral. Dan pada tanggal 26 Agustus 2002, India mengambil keputusan untuk meratifikasi Protokol Kyoto¹⁵. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Protokol Kyoto diakui legalitasnya. Rusia yang pada waktu itu menunda proses ratifikasi Protokol Kyoto, akhirnya pada tanggal 18 November 2004 meratifikasi Protokol Kyoto. Dan Protokol Kyoto akhirnya mulai berkekuatan hukum pada tanggal 16 Februari 2005¹⁶.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat pertanyaan sebagai berikut :

“Mengapa India yang tidak memiliki kewajiban dalam penurunan gas rumahkaca meratifikasi Protokol Kyoto?”

¹⁴ Download@<http://www.hindhu.com>, diakses tanggal 21 September 2004

¹⁵ Download@http://www.envfor.nic.in/cc/India_unfccc.htm, diakses tanggal 12 Juni 2005

¹⁶ Download@<http://www.teriin.org/nss/fullreport.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2005

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas maka penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut dengan bertumpu pada teori yang pertama yaitu teori lingkungan "*Man-Milieu Relationship*¹⁷". Kerangka teori yang dikemukakan oleh Harold dan Margaret Sprouts.

Menurut Harold dan Margaret Sprouts bahwa masyarakat politik memiliki basis geografis untuk menerangkan tingkah laku politik. Masing-masing masyarakat politik terletak pada suatu wilayah yang merupakan kombinasi unik dalam hal lokasi, ukuran, bentuk, iklim, dan sumber-sumber alamnya. Harold dan Margaret Sprouts juga mengungkapkan bahwa sebagian terbesar aktivitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak rata dari sumber-sumber *human* dan *non human*. Faktor-faktor lingkungan yang *human* dan *non human* itu mempengaruhi kegiatan manusia hanya dalam dua segi. Pertama, faktor-faktor itu bisa mempengaruhi keputusan-keputusan manusia hanya jika manusia memperhatikannya. Kedua, faktor-faktor itu dapat membatasi tindakan individu atau hasil keputusan berdasarkan persepsi-persepsi tentang lingkungan.

Dari pernyataan suami istri Harold dan Margaret Sprouts diatas dapat digunakan untuk menganalisa pokok permasalahan diatas. Perubahan iklim yang ekstrem melahirkan pemanasan global yang dipicu oleh kegiatan manusia yang kelewat batas dalam memenuhi kebutuhan mereka. Perubahan iklim ini merupakan salah satu faktor lingkungan (*non human*) yang mempengaruhi aktivitas masyarakat politik baik individual, kelompok atau masyarakat dalam suatu negara dalam menentukan keputusan-keputusannya.

¹⁷ James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraf, Jr, *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey*, Third Edition, Harper Collins Publisher, New York, 1990

Untuk mengelola lingkungannya berdasarkan kondisi geografis dan melihat kondisi bumi yang makin rapuh ini, India sebagai masyarakat politik berkeinginan untuk memulihkan keadaan lingkungan yang semakin tidak stabil. Dengan kata lain, keadaan lingkungan tersebut membuat India mengambil keputusan untuk meratifikasi Protokol Kyoto guna menangani masalah lingkungan internal India sendiri, yaitu banyaknya bencana alam baik itu banjir, kelaparan akibat kemiskinan, gelombang panas dan bencana alam lainnya yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrem.

Keputusan India meratifikasi Protokol Kyoto ini telah mencerminkan sikap politisnya sebagai masyarakat politik dan menunjukkan kepada negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang lain untuk menyelesaikan masalah lingkungan ini melalui pendekatan multilateral yang dipandang lebih baik daripada pendekatan unilateral. Karena masalah lingkungan ini adalah masalah global yang harus ditangani bersama. Hal itu diungkapkan oleh direktur pusat pengetahuan dan lingkungan India, Sunita Narain dalam pertemuan KTT Bumi¹⁸. Merujuk pada faktor lingkungan yang kedua sebagaimana diungkapkan oleh Harold-Margaret Sprouts, yaitu faktor lingkungan yang *human* dan *non human* itu dapat membatasi tindakan individu atau hasil keputusan individu berdasarkan persepsi-persepsinya tentang lingkungan. Dalam memenuhi setiap kebutuhannya, manusia tidak akan bisa lepas dari lingkungannya. Lingkungan akan selalu menjadi faktor pendukung bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadikan manusia lupa bagaimana memanfaatkan potensial sumber alam yang ada. Konsumsi berlebih terhadap energi fosil seperti minyak bumi, batu bara yang tidak didukung oleh kemampuan rosot (*sink*) untuk menyerap gas-gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrousoksida (N₂O) dan lainnya

¹⁸ [Download@http://www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), diakses tanggal 27 Februari 2004

mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca meningkat. Sehingga suhu permukaan bumi pun juga meningkat dan membawa berbagai konsekuensi antara lain meningkatnya air laut dan terjadinya gangguan pola cuaca. Atau dengan kata lain, naiknya suhu permukaan bumi yang sering disebut dengan pemanasan global ini membawa dampak perubahan iklim yang sangat ekstrem. Perubahan alam yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengelola lingkungannya membawa dampak yang begitu merugikan bagi manusia itu sendiri.

Keadaan di atas tidak bisa dibiarkan begitu saja. Meskipun dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya, haruslah ada batasan-batasan dalam aktifitasnya mengelola lingkungan. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu menggunakan sebuah teknologi.

Sprouts menekankan bahwa teknologi dan perubahan sosial memainkan peranan penting dalam hubungan manusia dengan lingkungannya¹⁹. Semakin majunya teknologi membuat manusia dalam mengelola lingkungannya tidak mengindahkan batasan yang harus mereka ikuti. Akibatnya bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat politik dunia saat ini. Yang paling merasakan dampaknya yaitu negara sedang berkembang (*Developing Countries*). Dalam hal ini penulis menunjuk India sebagai salah satu negara sedang berkembang yang ikut merasakan dampak buruk dari perubahan iklim yang *non human* yaitu perubahan iklim yang ekstrem. Menurut Sprouts, kemajuan teknologi haruslah membuat limitasi yang dipaksakan oleh tertib relatif secara politis. Merujuk pada akar masalah yang sebenarnya pendapat yang diuraikan Sprouts sangatlah bertentangan dengan realitas kondisi lingkungan saat ini. Limitasi dalam pemanfaatan kemajuan teknologi yang diungkapkan Sprouts malah

¹⁹ James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraf, Jr., *Op. Cit.*, Hal: 69

tidak diterapkan. Kemajuan teknologi malah justru dimanfaatkan oleh sebagian besar negara maju untuk melakukan aktivitas kegiatan industrinya hingga kelewat batas.

Oleh karena itu sebagian besar dari masyarakat politik dunia yang sadar akan pentingnya eksistensi sebuah lingkungan membuat sebuah perjanjian lingkungan internasional yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto. Perjanjian ini merupakan suatu bentuk limitasi bagi manusia dalam bertindak terhadap lingkungannya. Bisa jadi bagi negara yang tidak sepakat dengan Protokol Kyoto ini menganggap bahwa solusi itu sangat membatasi suatu negara dalam bertindak atau mengeluarkan kebijakannya. Dan hal ini akan dirasakan sangat merugikan bagi negara yang keberatan dengan perjanjian tersebut. Salah satu negara yang menolak Protokol Kyoto yaitu Amerika Serikat. Negara yang emisi gas rumahkacanya paling besar di dunia ini malah justru menolak Protokol Kyoto karena alasan kestabilan ekonomi negara mereka²⁰.

Lain halnya dengan negara India, dibatasi dengan aturan yang berlaku secara politis dengan dikeluarkannya Protokol Kyoto tidak membuat India merasa ruang geraknya untuk mengelola lingkungannya sendiri dibatasi. Memandang pentingnya sebuah lingkungan yang stabil terutama faktor iklim membuat India mengambil keputusan meratifikasi Protokol Kyoto. Hal ini dilakukan India dengan menimbang bahwa India sedang berada pada tahap pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dan juga guna mempersiapkan pertemuan para pihak ke-8 (*Conference of Parties 8*) dimana India pada saat itu menjadi tuan rumah konferensi para pihak ke-8 pada tanggal 23 Oktober sampai 1 November 2002²¹. Pertemuan para pihak ini membahas mengenai penyebab perubahan iklim global dan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) bagi negara sedang berkembang.

²⁰ Murdiyarto, Daniel, *Protokol Kyoto : Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, KOMPAS, Jakarta 2003, hal : 26-27

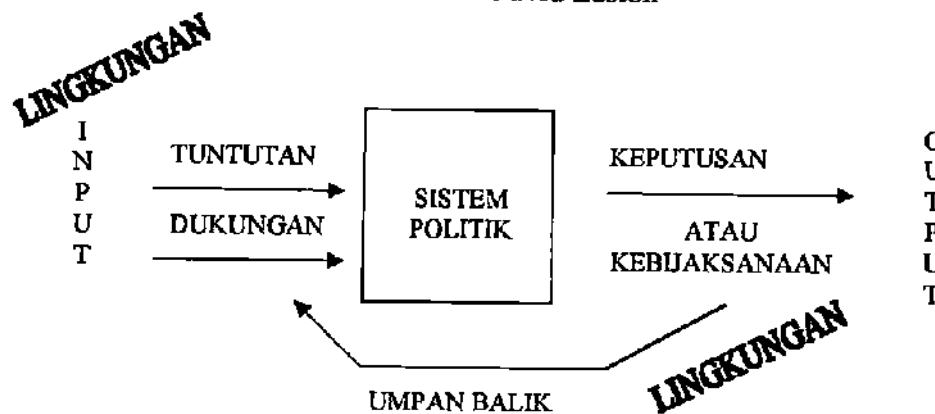
²¹ [Download@http://www.highbeam.com](http://www.highbeam.com), diakses tanggal 28 Mei 2004-India Ratifies Kyoto Protocol

Setidaknya, India sudah mempunyai komitmen sebagai anggota konvensi perubahan iklim (UNFCCC), yaitu dengan meratifikasi Protokol Kyoto.

Kerangka teori yang kedua yaitu "*Teori Sistem Politik*" yang dikemukakan oleh David Easton. Didalam teorinya Easton menggambarkan kehidupan masyarakat politik sebagai suatu sistem. Sistem politik dan lingkungannya dihubungkan oleh hubungan *input-output*²². Sistem politik itu sendiri dipandang sebagai *konversi* atau perubahan, yaitu menjadi *input* atau *output*. Rumusan ini secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut: *input-sistem* atau *proses politik-output*. Sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu.

Untuk menggambarkan secara menyeluruh, dibawah ini sistem politik dijelaskan dalam diagram berikut dibawah ini yang merupakan model yang bisa dipakai sebagai pendekatan dalam mempelajari kehidupan politik :

Skema 1. Model Sistem Politik David Easton²³



Permasalahan kehidupan tidak dapat lepas dari lingkungan. Harus diakui lingkungan mempunyai signifikansi tertentu bagi kehidupan, termasuk politik didalamnya. India didalam menghadapi masalah perubahan iklim global yang

²² Mohtar Mas' oed, Colin McAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal: 5

²³ David Easton, *An Approach to the Analysis of Political System*, dikutip dari Mohtar Mas'ed & colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, 1978, hal: 5

cenderung berdampak buruk terhadap lingkungan internalnya, berpikir kedepan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan.

Dalam mempertahankan dan menjaga lingkungannya serta menangani permasalahan yang muncul, pemerintah India membuat keputusan-keputusan yang bersifat politis.

Berbicara mengenai pembuatan keputusan, semua tindakan yang lebih kurang berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat termasuk dalam suatu *sistem politik*.

Untuk menjamin bekerjanya suatu sistem diperlukan input-input yang ajeg. Tanpa *input*, sistem itu tidak akan berfungsi. Didalam sistem politik, *input-input* tersebut dibedakan menjadi dua yaitu : *tuntutan* dan *dukungan*.

Kemudian dari input tuntutan dan input dukungan ini akan menghasilkan suatu jenis *output* yang akan berpengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem itu berada.

Mengkaji permasalahan yang penulis paparkan sebelumnya, Teori Sistem Politik David Easton ini sangat relevan untuk menganalisa alasan India meratifikasi Protokol Kyoto. Keputusan India meratifikasi Protokol Kyoto dipengaruhi oleh adanya *tuntutan* dan *dukungan* yang muncul baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) disekitar lingkungannya.

India yang berpenduduk lebih dari satu milyar jiwa ini sangat rentan terhadap bahaya banjir, kekeringan, permukaan air laut yang naik, dan bencana alam lainnya yang disebabkan oleh perubahan iklim yang begitu ekstrem. Hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara tersebut. Akibatnya, perekonomian India menjadi tidak stabil sehingga terjadi ketidakseimbangan sistem antara pembangunan ekonomi dan lingkungan global negara India. Selain

pertumbuhan ekonomi yang merosot, kondisi lingkungan geografis India pun menjadi rentan terhadap berbagai macam bencana alam. Hal ini menimbulkan banyaknya tuntutan dari masyarakat India agar pemerintah berpikir cepat untuk segera mengambil langkah tepat dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi dan menurunnya fungsi ekosistem alam bagi manusia, seperti menurunnya fungsi hutan, produktivitas lahan pertanian yang menurun, meningkatnya polusi udara akibat kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan, dan sebagainya. Memang kegiatan industri di India sudah bisa dikatakan maju. Namun, pemerataan hasil pembangunan itu belum sepenuhnya bisa direlokasikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Hanya mereka yang melakukan urbanisasi saja yang kemungkinan besar bisa memperbaiki kondisi ekonomi.

Tuntutan positif yang datang dari rakyat India sendiri membuat pemerintah India lebih memusatkan perhatian pada permasalahan lingkungan yang terjadi, yaitu dengan membuat suatu keputusan yang bisa memperbaiki dan menguntungkan kondisi lingkungan dan ekonomi negara India. Tindakan politik yang dilakukan pemerintah India yaitu dengan mengadopsi Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) yang merupakan salah satu mekanisme didalam Protokol Kyoto.

Melalui partisipasi politik ini, negara India bisa memperbaiki kondisi ekonominya dengan memperbaiki sektor energi dan efisiensi terhadap penggunaan energi yang merupakan faktor pendukung utama didalam proses kegiatan ekonomi di India sebagaimana tercantum dalam proyek-proyek yang ditawarkan CDM (*Clean Development Mechanism*). Tercatat pula India berpenduduk diatas satu milyar jiwa²⁴. Keadaan ini menimbulkan arus urbanisasi yang pesat disetiap kota di India. Arus urbanisasi yang besar ini pula yang mendorong kegiatan ekonomi India menjadi maju

²⁴ [Download@http://www.odci.gov](http://www.odci.gov), diakses tanggal 24 November 2004

pesat. Dan India tercatat sebagai negara industri sedang berkembang yang sedang tumbuh besar, sejajar dengan China, ASEAN, dan Brazil. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan majunya industri di India membuat sebagian negara maju, seperti Amerika Serikat, mengklaim bahwa India juga termasuk negara yang mengeluarkan emisi sangat besar. Dalam pertemuan konferensi para anggota ke-6 (*Conference of Parties, COP6*) di Bonn, Jerman, 19-27 Juli 2001, Goerge Walker Bush, presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa :”Pengemisi terbesar kedua dunia gas rumah kaca adalah China. Dan China secara keseluruhan dibebaskan dari kewajiban Protokol Kyoto. India dan Jerman berada diantara pengemisi terbesar. India pun juga dibebaskan dari Kyoto²⁵”. Karena alasan tersebut, lebih lanjut Bush menegaskan :”Protokol Kyoto secara fundamental cacat!” Pernyataan Bush diatas oleh negara-negara di dunia dianggap sebagai ketidakpuasannya akan konsep Protokol Kyoto yang hanya mewajibkan negara maju menurunkan emisinya dan membebaskan negara sedang berkembang seperti China dan India dari kewajiban menurunkan emisi gas rumahkaca yang notabene kedua negara itu diklaim Amerika Serikat sebagai negara industri besar di negara sedang berkembang.

Populasi India yang besar, lebih dari satu milyar jiwa dengan pertumbuhan 25 juta jiwa tiap tahunnya dan aktivitas industri yang semakin besar menjadi sorotan negara maju seperti Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Protokol Kyoto yang waktu itu masih menjadi perdebatan karena efektivitasnya sebagai hukum internasional yang belum kuat, Amerika juga mengklaim bahwa India seharusnya dimasukkan dalam daftar negara-negara yang berkewajiban menurunkan emisi gas rumahkacanya. Tuntutan Amerika Serikat ini oleh negara-negara lain di dunia dianggap sebagai ketidakpuasannya akan konsep

²⁵ [Download@http://www.AsiaSource.org/asip/pact_politics.cfm](http://www.AsiaSource.org/asip/pact_politics.cfm), diakses tanggal 12 Juni 2004

Protokol Kyoto yang hanya mewajibkan negara maju untuk menurunkan emisinya dan membebaskan negara sedang berkembang (*Developing Countries*), seperti China dan India dari kewajiban menurunkan emisi GRK untuk periode 2008-2012. Selain itu, tuntutan tersebut sebagai dalih Amerika Serikat agar terbebas dari kewajiban menurunkan emisi gas rumahkaca yang memang dari awal terbentuknya Protokol Kyoto sudah tidak menyetujui perjanjian tersebut.

Dalam kesatuan sistem politik, selain tuntutan yang ditujukan terhadap kebijakan pemerintah India dalam menangani masalah lingkungan internalnya dan lingkungan global, negara India juga mendapat dukungan baik dari dalam negeri India sendiri dan negara-negara lain di seluruh dunia yang juga mendukung dilaksanakannya Protokol Kyoto. Dukungan mengalir kepada negara India, terutama yang paling besar berasal dari organisasi non-pemerintah (NGO) India seperti *Tata Energy Research Institute* (TERI), dan *Centre for Science and Environment* (CSE) yang bekerjasama dengan Departemen Lingkungan dan Kehutanan (*Ministry of Environment and Forests, MoEF*)²⁶.

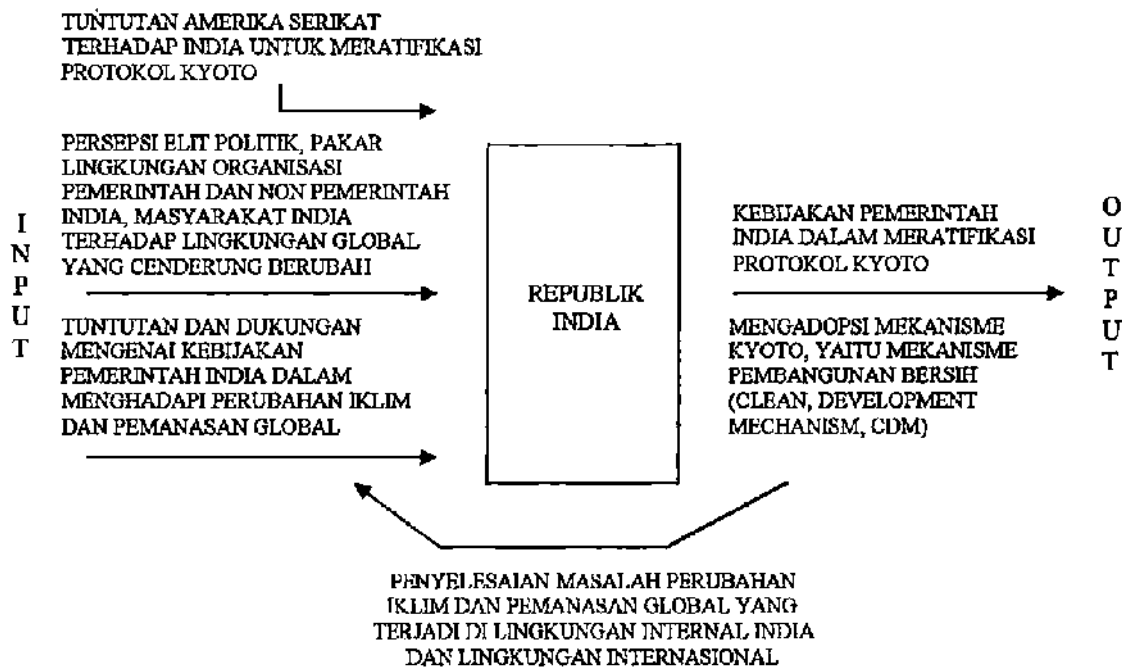
Selain itu, dalam perolehan dana adaptasi terhadap perubahan iklim dari luar negeri, TERI mendapat bantuan dan dukungan dari badan-badan multilateral seperti World Bank, *United Nations Environment Programme* (UNEP), European Commission, Badan Bantuan Teknis Amerika Serikat (*United States Agency for International Development, USAID*) dan lain-lain serta badan-badan bilateral seperti *Swiss Development Cooperation*, yayasan seperti *Rockefeller Foundation* dan *MacArthur Foundation* serta organisasi global dan regional seperti *Asian*

²⁶ [Download@http://www.cdr.dk/working_papers/wp-98-11.htm](http://www.cdr.dk/working_papers/wp-98-11.htm), diakses tanggal 8 Juli 2005

terjadinya perubahan iklim. Kedua sumber alam tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap berlangsungnya kegiatan dan kondisi ekonomi suatu negara. Namun, dampaknya juga besar terhadap kondisi lingkungan alam terutama menyangkut kondisi iklim global. Pemanfaatan sumber alam secara berlebihan berdampak pada kenaikan suhu bumi yang tidak stabil, dan berlanjut pada perubahan iklim yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut dikarenakan es kutub meleleh. Lebih lanjut yang terjadi adalah bencana banjir, kekeringan akibat kemarau berkepanjangan karena perubahan sistem iklim bumi.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat politik dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk wadah internasional untuk mencari jalan terbaik bagi penyelesaian masalah perubahan iklim dan pemanasan global dalam kesatuan sistem politik. Merujuk kembali pada kerangka teori yang kedua, terdapat tiga sasaran yang dituju didalam sistem politik, yaitu : komunitas, rezim, dan pemerintah. Dalam mengupayakan jalan yang terbaik terhadap masalah perubahan iklim, dibentuklah Protokol Kyoto sebagai rezim internasional yang harus dipatuhi oleh seluruh komunitas internasional yang menjadi bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Dan pemerintah setiap negara menjadi aktor utama dalam mengambil keputusan terhadap pengadopsian dan proses ratifikasi terhadap rezim tersebut.

Skema 2. Analisa Model Sistem politik David Easton²⁸



Tuntutan dan dukungan yang muncul dari berbagai komunitas sosial maupun politik serta dukungan pemerintah India terhadap suatu rezim, yaitu Protokol Kyoto. Untuk menangani permasalahan perubahan iklim dan pemanasan global dalam konteks internasional telah merubah cara pandang pemerintah India dalam menghadapi dan menangani masalah yang terjadi di lingkungan internalnya dengan berpijak pada pendekatan multilateral untuk membuat suatu keputusan kongkret yaitu meratifikasi Protokol Kyoto sebagai bentuk output dari kebijakan pemerintah India terhadap lingkungan internalnya dan lingkungan global pada umumnya di dalam mendukung bekerjanya kesatuan sistem politik.

²⁸ David Easton, *An Approach to the Analysis of Political System*, dikutip dari Mohtar Mas'ed & Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, 1978, hal: 5

Sehingga prioritas pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) negara India dapat diteruskan melalui Protokol Kyoto ini.

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka dasar pemikiran diatas, maka dapat ditarik hipotesa sebagai kesimpulan sementara bahwa alasan India meratifikasi Protokol Kyoto yaitu :

Dengan meratifikasi Protokol Kyoto, India ingin mengadopsi CDM yang merupakan salah satu mekanisme di dalam Protokol Kyoto untuk mewujudkan prioritas pembangunan berkelanjutan

G. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis di dalam memperoleh data bahan analisa maka penulisan ini memerlukan batasan. Penelitian ini akan memfokuskan pada alasan India sudah meratifikasi Protokol Kyoto dan lebih lanjut akan berfokus kepada tema utama yaitu dampak Protokol Kyoto bagi India bila India meratifikasi Protokol Kyoto sehubungan dengan masalah lingkungan yang dialami India akhir-akhir ini.

Namun ada kemungkinan penulis akan sedikit menyinggung masalah diluar fokus pembahasan masalah tersebut dengan tidak keluar dari topik pembicaraan, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori maupun pendekatan kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Pengumpulan data penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka (*library research*). Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literature-literatur, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah dan surat kabar. Sedangkan data-data lain diperoleh dari media elektronik yaitu internet yang relevan dengan analisa diatas. Meskipun menganalisa data sekunder, penulis yakin bahwa penelitian ini tidak akan mengurangi kebenarannya ilmiahnya.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini ditulis dalam lima bab dengan sub topik pembahasan sebagai berikut :

- BAB I** Pada Bab I ini memuat Pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan, dan kerangka penulisan
- BAB II** Pada Bab ini penulis akan memaparkan masalah tentang latar belakang dibentuknya Protokol Kyoto, mekanisme yang diadopsi dalam Protokol Kyoto, dan isu integritas Protokol Kyoto di mata dunia
- BAB III** Bab ini menjelaskan tentang dampak perubahan iklim terhadap India, konsentrasi emisi gas rumahkaca (GRK) negara India, dan prospek implementasi CDM di India

BAB IV Bab keempat ini membahas tentang tuntutan dan dukungan dari berbagai komunitas politik, yaitu dari organisasi-organisasi dalam negeri India dan luar negeri, sector-sektor yang menjadi target India dalam melaksanakan CDM serta dampak Protokol Kyoto bagi India

BAB V KESIMPULAN